

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntansi

Akuntansi menghasilkan informasi dari suatu sistem akuntansi yang terdapat pada suatu perusahaan. Informasi yang dihasilkan merupakan informasi keuangan yang sistematis dan mudah dipahami internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan.

Menurut Bahri (2016:2) mengungkapkan bahwa, pengertian akuntansi yaitu:

“Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan transaksi dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan standar yang diakui secara umum, yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil operasinya kapan pun diperlukan, sehingga dapat mengambil atau membuat keputusan dan tindakan yang diperlukan.”

Sartono (2021:2) mengemukakan bahwa, “Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekobabmi dan kondisi perusahaan”. Informasi keuangan yang diperoleh ini dinamakan Laporan Keuangan, berisikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang diperoleh dalam kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai akuntansi di atas maka dapat dinyatakan bahwa Akuntansi adalah proses atau kegiatan yang melibatkan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang diakui umum. Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi transaksi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membantu pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekobabmi yang tepat.

2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan sangat penting karena memberikan gambaran tentang informasi mengenai keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang mudah dipahami dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal ataupun eksternal perusahaan.

Menurut Kieso (2019:7) menjelaskan bahwa:

“Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan perusahaan yang informatif dan akurat bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan sebagai penyedia modal. Pengambil keputusan membuat banyak jenis keputusan, serta banyak metode yang mereka gunakan dalam membuat berbagai keputusan dan kemampuan untuk memproses informasi.”

Pelaporan keuangan harus membantu pengguna informasi akuntansi memahami kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Selain itu, pelaporan keuangan juga harus tepat waktu dan akurat agar pemangku kepentingan dapat memahami kinerja perusahaan secara menyeluruh dan menemukan ancaman atau peluang pertumbuhan. Salah satu bagian dari proses pelaporan keuangan adalah laporan keuangan sendiri, yang merupakan dokumen yang menunjukkan bagaimana suatu organisasi atau entitas beroperasi dalam satuan moneter.

2.3 Unsur-unsur Pelaporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2019 terdiri dari:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekobabmi di masa depan diharapkan dapat diperoleh entitas.
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekobabmi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

Menurut Kieso (2019:62) unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Aset
Sumber daya milik perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekobabmi perusahaan diharapkan dapat diperoleh di masa depan.
2. Liabilitas
Utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar aset dengan manfaat ekonomi.

3. Ekuitas
Hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.
4. Penghasilan
Kenaikan manfaat ekobabmi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas.
5. Beban
Penurunan manfaat ekobabmi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas.

Berdasarkan uraian di atas mengenai unsur-unsur pelaporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban.

2.4 Pendapatan

2.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diperoleh perusahaan dari aktivitas utamanya, seperti menjual barang atau jasa. Ini adalah ukuran penting untuk melihat seberapa baik perusahaan menjalankan bisnisnya. Memahami apa itu pendapatan sangat penting agar kita bisa menilai kinerja dan potensi pertumbuhan perusahaan dengan lebih baik.

Pendapatan menurut Anna, dkk. (2021:114), merupakan hasil pemberian jasa yang diberikan kepada pelanggan yang merupakan mata usaha pokok dan normal perusahaan. Sedangkan menurut Harnanto (2019:102), mendefinisikan pendapatan sebagai “Pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya”.

Berdasarkan pada Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP bab 20 tahun 2019 dijelaskan bahwa, pendapatan adalah penghasilan yang muncul dari akibat transaksi atau kejadian berikut:

- a) Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);
- b) Pemberian jasa;
- c) Kontrak konstruksi;
- d) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.

Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan kejadian lain yaitu :

- a) Perjanjian sewa
- b) Dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan atas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai aset perusahaan dan mengurangi liabilitas yang terkait dengan penyerahan barang atau jasa.

2.4.2 Jenis dan Sumber Pendapatan

Perusahaan mempunyai dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Menurut Subramanyam (2017:93), pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang didapatkan dari aktivitas penjualan pokok Perusahaan. Pendapatan operasional dibagi menjadi 2, yakni :
 1. Pendapatan Kotor, pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor *return* barang dan potongan penjualan.
 2. Pendapatan Bersih, pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor *return* barang dan potongan penjualan.
2. Pendapatan non-operasional atau pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang didapatkan diluar dari aktivitas operasional Perusahaan. Pendapatan non-operasional dibagi menjadi 2, yaitu :
 1. Pendapatan sewa, pendapatan dari bunga atas jasa dalam menyewakan asset Perusahaan kepada pihak lain.
 2. Pendapatan dividen, penghasilan dari laba atau keuntungan dari berbagai saham dari Perusahaan lainnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) dalam Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan dapat timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini :

- a. Penjualan Barang
- b. Penjualan Jasa, dan
- c. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa jenis-jenis pendapatan Perusahaan dibagi menjadi 2 yaitu, pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional dibagi lagi menjadi 2 yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Sedangkan pendapatan non-operasional terbagi menjadi 2, pendapatan sewa dan pendapatan dividen. sumber-sumber pendapatan perusahaan

berasal dari aktivitas operasional usaha seperti penjualan barang, jasa dan penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, serta dapat berasal dari royalty dan deviden.

2.4.3 Pengakuan Pendapatan

Dalam akuntansi pendapatan, masalah utama adalah menentukan pengakuan pendapatan. Ada saat-saat ketika barang dan jasa diserahkan dan menghasilkan pendapatan pada saat yang sama, dan ada saat ketika penyerahan barang dan jasa terlebih dahulu, dan imbalannya atau pendapatannya diterima kemudian. Akibatnya, terdapat masalah tentang kapan dan seberapa besar pendapatan dicatat.

Menurut Martani, dkk. (2018:208) mengemukakan bahwa:

“Pendapatan diakui ketika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan diterima oleh perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan tepat. Pendapatan tidak hanya diakui pada saat pemenuhan kewajiban, yaitu ketika barang atau jasa diserahkan, tetapi juga dapat diakui pada saat sebelum atau sesudah pemenuhan kewajiban.”

Wijoyo (2018:2036) mengungkapkan bahwa pendapatan diakui pada saat:

1. Selesaiannya produksi,
2. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi,
3. Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima,
4. Pendapatan dari penjualan konsinyasi.

Pendapatan direalisasi saat asset yang diterima siap ditukarkan dengan sejumlah kas atau setara kas. Pendapatan ditahan saat substansi dari satu-kesatuan pertukaran tersebut harus mendatangkan keuntungan (laba) yang dihasilkan dari pendapatan tersebut yaitu laba diakui atau punya nilai komplit

Menurut Kieso (2019:68) prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*) menunjukkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan yang tepat meliputi tiga hal:

- Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim kas (piutang)
- Pendapatan dapat direalisasi apabila aset yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui.
- Pendapatan dihasilkan (*earned*) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni

apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Berdasarkan penjelasan terkait pengungkapan pendapatan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan diakui pada saat perusahaan menerima manfaat ekonomi dan dapat diukur secara andal. Pendapatan tidak hanya diakui saat kewajiban dipenuhi, yaitu ketika barang dan jasa diserahkan, tetapi juga bisa diakui sebelum atau sesudah kewajiban dipenuhi.

2.4.4 Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan adalah jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi selama periode waktu tertentu. Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar atas imbalan yang diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Menurut Martani, dkk. (2016:204) mengemukakan bahwa, “Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.” Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. PSAK No.72 tahun 2019, “pengukuran pendapatan adalah pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.”

Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau dapat diterima. Biaya seperti diskon penjualan, potongan penjualan, dan pajak harus dikeluarkan dari pendapatan.

2.4.5 Pengungkapan Pendapatan

Secara konseptual, pengungkapan adalah komponen penting dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan adalah langkah terakhir dalam proses akuntansi, di mana informasi disajikan dalam bentuk statemen keuangan yang lengkap.

Menurut Apriyanti (2018:88) pengungkapan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pengungkapan (*disclosure*) merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaporan keuangan yang terdapat di bagian akhir proses pelaporan keuangan dengan memberikan penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan

keuangan. Pengungkapan dibagi menjadi dua jenis diantaranya pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).”

Pengungkapan dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Pengaturan tentang pengungkapan pendapatan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia terdapat dalam PSAK No.72 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa,
- b) Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, pengungkapan pendapatan terdapat PSAK No.72 digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan merupakan tahapan penting dalam akuntansi karena merupakan proses terakhir pelaporan keuangan. Perusahaan dalam pengungkapan pendapatan haruslah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Perusahaan juga harus mengungkapkan jumlah pendapatan yang diakui selama periode tersebut.

2.5 Beban Operasional

Dalam menjalankan aktivitasnya, suatu perusahaan mengeluarkan beban untuk aktivitas operasionalnya. Beban merupakan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Menurut Kieso (2019: 69) beban adalah arus kas keluar atau “penggunaan” lain dari aset atau munculnya liabilitas (atau gabungan keduanya) selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan/atau penyediaan jasa.

Zoebaidha (2022: 19) mendeskripsikan:

Beban adalah sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh laba. Beban dapat dikategorikan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha.

1. Beban Usaha, adalah pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha pokok perusahaan. Misalnya:
 - a) Beban gaji
 - b) Beban listrik, air dan telepon
 - c) Beban iklan
 - d) Beban penyusutan
2. Beban Diluar Usaha, adalah pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Misalnya:
 - a. Beban bunga. Beban (biaya) yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari Bank
 - b. Beban macam-macam.

Menurut Lubis (2017:20) beban/biaya dalam perusahaan jasa diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Biaya operasional/biaya usaha
Yaitu beban/biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional kantor.
Contoh: beban gaji, beban listrik, beban air, beban telepon, beban iklan, beban penyusutan, dan sebagainya.
2. Biaya di luar usaha/biaya umum dan administrasi
Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan di luar kegiatan operasional kantor.
Contoh: biaya administrasi bank, biaya sewa, biaya sumbangan, dan sebagainya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2019) dalam SAK ETAP mendefinisikan “Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.” Menurut IAI (2019) dalam SAK ETAP bab 2 tahun 2019 pada paragraf 2.37 menjelaskan bahwa pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Maka, berdasarkan penjelasan diatas penyajian beban pada laporan laba rugi perusahaan jasa disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Format Laporan Laba Rugi Perusahaan Jasa

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX		
PENDAPATAN		
Pendapatan usaha		XXX
TOTAL PENDAPATAN		XXX
BEBAN OPERASIONAL		
Beban gaji	XXX	
Beban listrik	XXX	
Beban air	XXX	
Beban telepon	XXX	
Beban iklan	XXX	
Beban penyusutan	XXX	
Beban sewa	XXX	
Beban perlengkapan	XXX	
TOTAL BEBAN OPERASIONAL		XXX
LABA/RUGI KOTOR		XXX
PENDAPATAN DI LUAR USAHA		
Pendapatan bunga bank	XXX	
TOTAL PENDAPATAN DI LUAR USAHA		XXX
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		
Gaji karyawan	XXX	
Administrasi kantor	XXX	
TOTAL BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		(XXX)
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK		XXX
Beban pajak	XXX	
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		XXX

Sumber: SAK ETAP (2019)

2.6 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu rangkaian dalam prosedur pembuatan laporan keuangan untuk keseragaman dalam penyajian laporan keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) artinya diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*

statement) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

SAK ETAP dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sudah diratifikasi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa Standar akuntansi yang sudah ada seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP.

Menurut Bahri (2016:23) menyatakan pengertian tentang SAK ETAP sebagai berikut:

“SAK ETAP adalah suatu standar yang hadir sebagai solusi bagi para entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan guna tujuan umum bagi para pengguna eksternal seperti kreditor dan lembaga perkreditan.”

2.6.1 Pendapatan Menurut SAK ETAP

Ikatan Akuntan Indonesia (2019) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas agar entitas yang belum menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dapat memberikan laporan keuangan yang akurat. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan pedoman yang dibuat khusus untuk entitas yang menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum. Dalam SAK ETAP terdapat bab yang khusus membahas pendapatan yaitu pada Bab 20. Di dalam SAK ETAP bab 20 tahun 2019 berisi tentang perlakuan akuntansi dalam menyusun pendapatan yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan pada SAK ETAP bab 20 tahun 2019 dijelaskan bahwa, pendapatan adalah penghasilan yang muncul dari akibat transaksi atau kejadian berikut:

- a) Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);
- b) Pemberian jasa;
- c) Kontrak konstruksi;
- d) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty atau dividen.

Selain transaksi yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, dalam SAK ETAP bab 20 tahun 2019 juga mengungkapkan terdapat pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan kejadian lain yaitu:

- a) Perjanjian sewa
- b) Dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK ETAP bab 20 tahun 2019, “pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.”

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan atas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai aset perusahaan dan mengurangi liabilitas yang terkait dengan penyerahan barang atau jasa.

2.6.2 Pengakuan Pendapatan Jasa

Pengakuan pendapatan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah prinsip yang mengatur kapan dan bagaimana entitas mengakui pendapatan dalam laporan keuangan mereka. Pendapatan dalam SAK ETAP diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Pengakuan pendapatan merupakan hasil dari akibat aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Dalam SAK ETAP bab 20 pada paragraf 20.12, jika hasil transaksi yang melibatkan penyediaan jasa dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan yang berhubungan dengan transaksi sesuai dengan tahap

penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Berikut merupakan pengakuan pendapatan jasa menurut SAK ETAP bab 20 tahun 2019, hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal jika memenuhi semua kondisi berikut:

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
Jumlah pendapatan dari pemberian jasa harus dapat diukur secara andal. Ini mencakup kemampuan entitas untuk menentukan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima.
2. Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas.
Pendapatan dari pemberian jasa diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Ini berarti harus ada keyakinan yang cukup bahwa entitas akan menerima imbalan atas jasa yang telah diberikan.
3. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal.
Pendapatan dari pemberian jasa diakui dengan merujuk pada tahap penyelesaian transaksi pada tanggal laporan keuangan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian termasuk:
 - Survei atas pekerjaan yang telah dilakukan.
 - Penyelesaian atas proporsi jasa yang telah diberikan.
 - Metode satuan tertentu yang mencerminkan tingkat penyelesaian dari transaksi tersebut.
4. Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal.
Pengakuan pendapatan jasa juga mengharuskan entitas untuk dapat mengukur biaya yang telah terjadi dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi secara andal. Ini memastikan bahwa pendapatan yang diakui tidak melebihi biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelesaian jasa tersebut.

Pada SAK ETAP bab 20 paragraf 20.13, dijelaskan bahwa jika jasa diberikan melalui beberapa pekerjaan yang tidak ditentukan dalam jangka waktu tertentu, maka entitas mengakui pendapatan secara garis lurus selama jangka waktu tersebut. Jika suatu pekerjaan dianggap lebih penting dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, maka entitas menunda pengakuan pendapatan sampai pekerjaan penting tersebut diselesaikan. Apabila transaksi tersebut tidak dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan hanya sampai dengan beban yang dapat diperoleh kembali.

Tingkat penyelesaian jasa dapat ditentukan dengan berbagai metode, sesuai dengan sifat jasa. Metode tersebut dapat mencakup: survei pekerjaan yang telah dilaksanakan, jasa yang dilakukan sampai tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan, atau proporsi biaya yang timbul sampai tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya jasa tersebut. Sebagai catatan, pembayaran berkala dan uang muka yang diterima pelanggan sering kali tidak menunjukkan jasa yang diberikan. Akibatnya, pembayaran ini tidak serta merta dianggap sebagai pendapatan langsung selama periode pembayaran tersebut.

Menurut Warren (2017:110) dasar pengakuan pendapatan secara umum ada dua cara, yaitu:

1. Basis kas (*cash basis*)
Pada akuntansi berbasis kas, pendapatan diakui ketika kas telah diterima dari pelanggan
2. Basis akrual (*accrual basis*)
Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui ketika jasa telah dilakukan atau barang telah diberikan kepada pelanggan.

Dalam pengakuan pendapatan terdapat dua basis yang digunakan yaitu basis akrual dan basis kas. Basis akrual adalah metode pengakuan pendapatan dan beban pada periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Pada basis akrual, pendapatan diakui ketika jasa telah diberikan atau barang dijual, meskipun pembayaran belum diterima. Basis kas adalah metode pengakuan pendapatan dan beban pada saat kas diterima atau dibayarkan. Pada basis kas, pendapatan diakui hanya ketika kas atau setara kas diterima.

Saat pengakuan pendapatan, terdapat pencatatan yang harus dilakukan perusahaan dengan menggunakan metode basis akrual (*accrual basis*). Pencatatan pendapatan ketika jasa diberikan atau barang dijual sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jurnal Pengakuan Pendapatan

Tanggal	NamaAkun	Debit	Kredit
XX-XX- 20XX	Aset (Piutang)	RpXXXXXX	
	Pendapatan Jasa		RpXXXXXX
	PPN Keluaran		RpXXXXXX

Sumber: SAK ETAP bab 20 tahun 2019

Berikut merupakan pencatatan pada jurnal yang dapat dilakukan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Jurnal Pengakuan Pendapatan Jasa

Tanggal	NamaAkun	Debit	Kredit
XX-XX- 20XX	Piutang Usaha	RpXXXXXX	
	Pendapatan Jasa		RpXXXXXX
	PPN Keluaran		RpXXXXXX

Sumber: SAK ETAP bab 20 tahun 2019

Langkah selanjutnya yaitu ketika penerimaan pembayaran atas jasa atau barang yang dijual jurnal yang dicatat yaitu:

Tabel 2. 4 Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	NamaAkun	Debit	Kredit
XX-XX- 20XX	Kas/Bank	RpXXXXXX	
	Piutang Usaha		RpXXXXXX

Sumber: SAK ETAP bab 20 tahun 2019

2.6.3 Pengukuran Pendapatan

Pada SAK ETAP bab 20 tahun 2019 dinyatakan bahwa “pengukuran adalah suatu proses penetapan jumlah uang yang digunakan untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan, termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu” .

Dalam SAK ETAP bab 20 tahun 2019 menyatakan bahwa dalam mengukur pendapatan “Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume”. Pada paragraf 20.4 perusahaan harus memasukkan manfaat ekonomi dalam pendapatan yang diterima atau masih harus diterima secara bruto. Perusahaan juga harus mengeluarkan sejumlah nilai dari pendapatan untuk pajak pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Hanya komisi yang dapat dimasukkan dalam pendapatan entitas dalam hubungan keagenan, uang yang diterima oleh prinsipal tidak dimasukkan dalam pendapatan entitas.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam melakukan pengukuran pendapatan, perusahaan harus mengukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau dapat diterima. Biaya seperti diskon penjualan, potongan penjualan, dan pajak harus dikeluarkan dari pendapatan..

2.6.4 Pengungkapan Pendapatan

Menurut IAI (2019) dalam SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), pengungkapan pendapatan harus mencakup informasi yang cukup untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang jenis, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan serta arus kas yang dihasilkan dari kontrak dengan pelanggan.

Pada SAK ETAP bab 20 tahun 2019 tentang pendapatan, dinyatakan bahwa dalam pengungkapan pendapatan perusahaan harus menunjukkan:

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa; Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan saat pendapatan diakui.
- b) Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari:
 1. Penjualan barang;
 2. Penyediaan jasa;
 3. Bunga;
 4. Royalti;
 5. Dividen;
 6. Jenis pendapatan signifikan lainnya.

Perusahaan harus mengungkapkan rincian pendapatan berdasarkan jenis utama dari pendapatan tersebut. Ini dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang, pendapatan jasa, dan pendapatan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan merupakan tahapan penting dalam akuntansi. Perusahaan dalam pengungkapan pendapatan haruslah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Perusahaan juga harus mengungkapkan jumlah pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Pengungkapan pendapatan menurut SAK ETAP bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang bagaimana pendapatan diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini harus mencakup

kebijakan akuntansi, rincian jenis pendapatan, pendapatan tangguhan, ketidakpastian estimasi, transaksi dengan pihak berelasi, segmen operasi, dan arus kas terkait dengan pendapatan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat memahami lebih baik kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan.